

Perbandingan Sistem Merit di Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Solidaritas Indonesia

Laga Sugiarto¹

¹Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

¹laga.sugiarto@gmail.com

ABSTRACT

Governance that can serve people optimally decided by quality of its leader, someone who emerge from recruitment, selection and promotion process within political party, that is underpinned of merit system, a system that based on three major principal, namely, virtue, social skill and capability. merit system has been implemented optimally in difference level by both Prosperous Justice Party (PKS) and Indonesian Solidarity Party (PSI). meanwhile, this research use empirical juridical method. in conclusion, this research can contribute to all parpol and government regarding with reform of political party management in the future that must be based on merit system.

Keywords: merit system, PKS, PSI

Abstrak

Pemerintahan yang mampu melayani rakyatnya secara optimal ditentukan oleh kualitas pemimpinnya, seorang yang dilahirkan dari proses rekrutmen, seleksi dan promosi di dalam partai politik, yakni proses yang berbasis kepada sistem merit, suatu sistem yang mengandalkan kepada tiga atribut utama, yakni kebajikan, keterampilan sosial dan kecerdasan. Sistem merit telah diterapkan secara optimal dalam variasi yang berbeda oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sementara itu, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. demikian, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi seluruh parpol dan pemerintah terkait pengaturan manajerial parpol ke depan harus berbasis kepada sistem merit.

Kata Kunci: sistem merit, PKS, PSI

*Laga Sugiarto.

Tel.: +62821-000-000

Email: laga.sugiarto@gmail.com

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



1. PENDAHULUAN

Kesuksesan suatu pemerintahan dalam memaksimalkan fungsi-fungsinya demi terpenuhinya hak-hak rakyat menjadi penanda kuat bahwa negara tersebut telah ditata dan dikelola dengan baik berdasarkan nilai-nilai Good Governance, pemerintahan yang baik ditentukan oleh kepemimpinan yang terbaik, kepemimpinan terbaik dilahirkan dari suatu proses yang terbaik pula, proses yang semuanya berawal dari hulu, hulu dari suatu kepemimpinan terbaik berada di partai politik, partai politik membidani untuk melahirkan pemimpin yang terbaik, kelahiran pemimpin terbaik diperoleh dari rekrutmen yang fair, proses rekrutmen yang berdasarkan sistem seleksi yang fair bagi kader partai politik terbaik.

Ikhtiar terhadap pencapaian tersebut sejauh ini, negara telah mengaturnya melalui UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, selanjutnya disebut UU Parpol (UU Perubahan Parpol), sebagaimana dalam pasal 2 disebutkan bahwa di dalam AD/ART setiap parpol memuat ketentuan mengenai mekanisme rekrutmen keanggotaan partai politik dan jabatan politik, serta sistem kaderisasi, yang berarti rekrutmen keanggotaan dan proses seleksinya diatur masing-masing internal partai politik, ketidakseragaman ini menyebabkan setiap parpol memiliki mekanismenya masing-masing, tentunya ini menunjukkan bahwa tidak semua parpol benar-benar serius terhadap upaya untuk melahirkan kader-kader terbaiknya, kelak menjadi pemimpin terbaik yang menjalankan pemerintahan untuk mensejahterahkan rakyat. Ketentuan ini pula dipertegas dengan pasal 29 mengenai rekrutmen WNI untuk keanggotaan partai politik untuk menjadi anggota partai politik, serta bakal calon anggota DPR dan DPRD berdasarkan sistem seleksi kaderisasi secara demokratis berdasarkan AD dan ART “masing-masing”. Demokratis yang berarti dapat ditafsirkan meluas dengan berdasarkan AD dan ART serta mekanisme masing-masing parpol.

Melihat Adanya keraguan terhadap upaya akan terciptanya suatu pemerintahan yang bersih, bebas anti korupsi dan sejahtera “*welfare state*”,

jika rekrutmen keanggotaan masing-masing parpol ditafsirkan dan diejewantahkan sesuka hatinya bahkan cenderung menjauh dari semangat “demokratis” itu sendiri, semisal sebut saja PDI Perjuangan, Demokrat serta parpol lainnya yang amat kuat mempertahankan semangat dinasti dalam suksesi kepemimpinan parpolnya, tentu hal ini tidaklah baik karena akan bertolak belakang jika setiap parpol menerapkan sistem merit dalam rekrutmen keanggotaan parpol, sistem yang menerapkan proses seleksi yang amat fair karena berdasarkan *IQ + Effort*, anti kekayaan (*wealth*) maupun keturunan (*hereditary*), sehingga dari proses ini mampu menghasilkan kader terbaik yang kelak menjadi kandidat pemimpin terbaik bagi negara ini.

Sistem merit ini di Indonesia, menarik jika mengamati Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang amat kuat dengan jargon partai kadernya, *well educated party*, sejauh pengamatan, partai yang tidak menganut sistem ketokohan, serta partai lainnya yang relatif baru dan diisi oleh kelompok menengah (Intelektual) yakni Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Tentunya penerapan sistem merit ini di setiap parpol akan bervariasi dengan derajat yang berbeda-beda pula, terlepas dari variasi tersebut, setidaknya kesepakatan pada satu nilai dasar untuk menyingkirkan segala keuntungan-keuntungan alamiah (kekayaan dan keturunan), dan yang terpenting lagi dari penerapan sistem merit ini oleh berbagai parpol di mana pun, barangkali ke depan tentu akan menjadi contoh/*role model* bagi yang lainnya untuk saling membenahi internal masing-masing, khususnya di Indonesia, dari sistem merit ini masyarakat menaruh harapan besar mendambakan dan membumikan suatu pemerintahan oleh yang terbaik demi tercapainya masa depan negara kesejahteraan Indonesia.

Dengan demikian, penulis dalam hal ini merumuskan dua permasalahan penting, yakni, pertama, bagaimana penerapan sistem merit di PKS dan PSI, dan kedua, bagaimana analisis penilaian/derajat sistem merit di PKS dan PSI.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ditulis menggunakan jenis huruf Times New Roman ukuran 12pt, justify, paragraf pertama menjorok ke dalam 1 cm,

penulisan kalimat antar paragraf tanpa tambahan spasi sebelum dan sesudah (no before and after space). Metode ditulis dengan singkat namun jelas memaparkan mengenai sifat/jenis penelitian, jenis data/bahan penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris, yaitu dengan menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan masalah yuridis-normatif dalam penelitian ini akan ditunjang dengan pendekatan empiris, adapun penelitian dilakukan dengan wawancara dan survey ke lokasi yang penulis anggap relevan dengan masalah yang diangkat. analisis data dilakukan dengan meneliti asas hukum di dalam UU Parpol tentang sistem merit sebagai premis umum, kemudian penerapannya di dalam AD/ART sebagai premis khusus, dan ditarik suatu kesimpulan sebagai silogisme.

3.1. Penerapan Sistem Merit di PKS dan PSI

Pengaturan di dalam pasal 29 ayat (1) UU Parpol, dimana partai politik melakukan rekrutmen untuk menjadi Anggota, Bakal Calon Anggota DPR, DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden. Rekrutmen parpol PKS dan PSI untuk pengisian posisi khususnya dua yang pertama tersebut di atas, yakni, **pertama**, PKS sendiri dalam penerapan sistem merit terhadap keanggotaan, tidak menerapkan persyaratan administrasi yang ketat dengan model seleksi berbasis sistem merit yang indikator utamanya yakni pendidikan, justru PKS tidak membedakan bagi siapa pun warga negara Indonesia (WNI) secara sukarela mendaftarkan diri menjadi anggota, pun penelusuran terhadap calon kader terkait pengalaman keorganisasiannya, serta penelusuran rekam jejak menyangkut moralitas anti korupsi dan anti toleransi tidak terlalu esensial, sehingga tidak menutup kemungkinan bagi siapa pun eks-napi tipikor untuk diterima bergabung dengan parpol. Sementara itu, sebaliknya, PSI menerapkan seleksi yang cukup ketat terhadap rekrutmen kader

keanggotaan, yang berarti tidak serta merta menerima seluruh WNI untuk bergabung dengan parpol meskipun latar belakang akademik tidak menjadi indikator utama, adapun PSI akan terlebih dahulu melakukan *background check* terhadap latar belakang calon kader, indikator terhadap calon kader yang berpotensi akan lolos bergabung atau tidak, harus ditentukan dengan tidak pernah terlibat ataupun memiliki semangat anti-korupsi dan anti-intoleransi, serta ditambah keharusan dari kalangan millennial dan relatif baru dalam kancah perpolitikan (belum pernah bergabung dengan parpol sebelumnya), namun dalam praktiknya PSI melakukan deviasi, melihat kasus pada umumnya yang biasa terjadi di parpol lainnya, yakni keluar dan masuknya seorang kader, dalam hal ini masuknya kader dari partai amanat nasional yang pada pilpres di periode Jokowi merupakan tim sukses pemenangan pasangan dari capres lawan, yakni faldo maldini, Selain itu, PSI juga pernah mengusulkan kadernya di Sulawesi yang jelas sudah tidak berasal dari kelompok usia milenial, serta ditambah beberapa kader lainnya, berinisial Chandra juga bukan dari golongan milenial, sehingga kian nampak bahwasanya dalam praktiknya PSI telah melanggar ideologi informal (garis partainya) sendiri. Kemudian, **kedua**, mengenai rekrutmen untuk menjadi bakal calon wakil rakyat baik di level nasional maupun daerah, PKS agak selektif dalam perekrutannya, karena PKS percaya bahwa wakil rakyat yang akan mengisi jabatan-jabatan publik harus dilahirkan dari kader parpol sendiri yang telah digembleng melalui berbagai ujian level kepemimpinan secara hirarkis, PKS percaya kader yang berkualitas termasuk akhlak yang mulia, akan lahir dari proses kaderisasi yang bertingkat melalui kewajiban ikut serta dan lulus sekolah kaderisasi (sekolah partai) yang berisikan kurikulum agama (wajib hafal dan lulus Juz Amma), namun tidak menutup pula kader di luar tanpa proses meritokrasi, PKS pun merekrut calon kader potensial yang dirasakan memiliki kapasitas yang baik untuk mengisi jabatan, semisal dari tokoh berbagai kelompok masyarakat, semisal tokoh

agama untuk menjadi kader kehormatan, hal ini bagi PKS penting, karena untuk menjadi wakil rakyat tak hanya berbekal kapasitas merit mumpuni (*education-based meritocracy*), namun pula perlu didukung oleh popularitas (elektabilitas) dan akhlak yang mulia. Sebaliknya, hal ini justru akan menjadikan PKS masuk dalam jebakan oligarki, karena tidak menutup kemungkinan pencalonan akan dipenuhi dengan rekomendasi dari para elit kuat di parpol, sehingga akan menghambat potensi dari kader sendiri dan dirasakan menjadi tidak fair. Sedangkan, PSI sendiri, memberikan akses kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk mencalonkan diri menjadi bakal calon wakil rakyat, namun untuk mekanisme seleksi pencalonan itu sendiri, PSI kurang maksimal dalam penerapan indikator utama sistem seleksi merit, adapun bagi para bakal calon harus mengikuti seleksi yang dimulai dari administrasi (belum mengutamakan calon dari lulusan minimal S1), kemudian surat rekomendasi, wawancara berupa esay oleh pansel independen. Namun, ada beberapa indikator yang bisa dikatakan PSI belum memenuhi indikator utama sistem merit, yakni, belumnya keharusan bagi para bakal calon minimal bergelar akademik S1, ditambah adanya surat rekomendasi pada saat pencalonan merupakan manifestasi oligarki, pemberian rekomendasi merupakan pintu masuk bagi KKN, karena pemberian rekomendasi oleh elit terhadap seseorang harus dan tak lain berdasarkan kedekatan pribadi, *Recommendation System*¹ sendiri dalam sejarah *China Imperial Examination System*, merupakan anti-tesa dari sistem meritokrasi yang berbasis kepada *Universal Examination System*.

3.2. Analisis Sistem Merit di PKS dan PSI

Melihat perbandingan kedua parpol tersebut di atas berkaitan dengan seleksi kader untuk menjadi anggota dan wakil rakyat, masing-masing parpol baik PSI atau PKS belum melaksanakan keseluruhan (ketiga) atribut dari sistem merit. Adapun atribut pertama,

¹ Daniel A. Bell, *Just Hierarchy: Why Social Hierarchies Matter In China and The Rest of The World*, (New Jersey: Princeton University Press, 2020), hal. 86.

yang berbasis kepada rumus $IQ + Effort = Merit^2$, jika menggunakan rumus tersebut dengan indikator utama dan satu-satunya adalah Intelektual (Intellectual Capability) atau Education-based Meritocracy, kedua parpol masih mengabaikan dan belum menganggap terlalu pentingnya kapabilitas intelektual akademik para calon anggota dan bakal calon wakil rakyat. Sedangkan, atribut kedua, untuk penilaian atas indikator utama Ketrampilan Sosial (Social Skill), masing-masing parpol menentukan indikatornya sendiri, jika PKS menggunakan indikator pengalaman organisasi sebelumnya baik pada lingkup mahasiswa maupun masyarakat sebagai pertimbangannya, sedangkan PSI menentukan melalui bacground check terhadap isu-isu pro toleransi. Dan terakhir, atribut ketiga, Kedua parpol dalam mengukur indikator Kebajikan (Virtue) sangat berbeda secara diametral, jika PKS mengukurnya dengan internalisasi syariat Islam dalam praktik kehidupan sehari-hari yang cenderung dogmatik irasional (masih permissif dengan korupsi), sedangkan PSI menggunakan alat ukur yang jauh lebih rasional dengan perilaku harus anti-korupsi (tidak pernah dipidana tipikor) bagi siapa pun yang ingin bergabung maupun mencalonkan diri. Lain halnya, jika indikator dari ketiga atribut tersebut ditentukan secara hirarkis, $Merit = Virtue > Social Skill > Intellectual$, dapat dikatakan meritokrasi PSI jauh lebih tinggi ketimbang PKS, karena PSI jauh lebih mencerminkan dan mengedepankan Anti Korupsi ketimbang PKS.

Tabel 3.1. Perbandingan Sistem Merit “Objective Approaches” Rekrutmen Partai Politik

No	Atribute: Independet Variabel	Main Indicator	PKS	PSI	PKC/ CCP
1	Virtue	No Corruption	Agree	Totally agree	-
2	Social Skill	Expertise	Agree	Agree	-
3	Intellectual	Education	Agree	Agree	-

² Michael Young, *The Rise of Meritocracy 1870-2033: An Essay on Education and Equality*, (Great Britain: Penguin Books, 1961), hal. 94.

Rumus: IQ + Effort = Merit	Score	High 35x20%=7	High 36x20%=7,2	-
Rumus: Virtue>SocialSkill>Intellectual	Score	High 40x30%=12	High 38x30%=11,4	-
Rumus: GRIT = Merit	Score	High 43x50%=21,5	High 44x50%=22	-
Keterangan	Persentase	Interpretasi		
	Grit: 50% Social Skill: 30% IQ: 20%	Grit	Social Skill	IQ
		18-22: Tinggi 11-17: Sedang 1-10: Rendah	8-12: Tinggi 5-7: Sedang 1-4: Rendah	7-8: Tinggi 4-6: Sedang 1-3: Rendah

Membaca tabel 3.1. dan grafik 3.3., secara kuantitatif, diperoleh score/hasil dari pengambilan data primer melalui pengisian kuesioner oleh responden para juru bicara parpol masing-masing meliputi tiga aspek IQ, Social Skill dan GRIT. Adapun hasilnya sebagai berikut, pertama, PKS memiliki score yang tinggi dari ketiga aspek pengukuran meliputi IQ, Social Skill dan GRIT, yakni 7, 10 dan 21,5. sedangkan PSI pun memiliki score yang sama tingginya pula, yakni 7,2, 11,4, 22. Demikian, dari perolehan score kedua parpol tersebut, berarti PSI dan PKS secara kuantitatif merupakan partai yang menjalankan sistem merit dengan derajat tinggi.

Demikian pula, untuk menyempurnakan pemahaman dari tabel 1 di atas tentunya dapat pula dengan menggunakan pendekatan lainnya sebagai triangulasi data, dengan melihat tabel 2, yakni, Subjective Approaches + Perceived Meritocracy, dengan teknik pengambilan data primer dari para narasumber selaku juru bicara masing-masing parpol, Purwanto dari PKS dan Andy dari PSI, melalui wawancara/observasi mendalam, adapun teknik

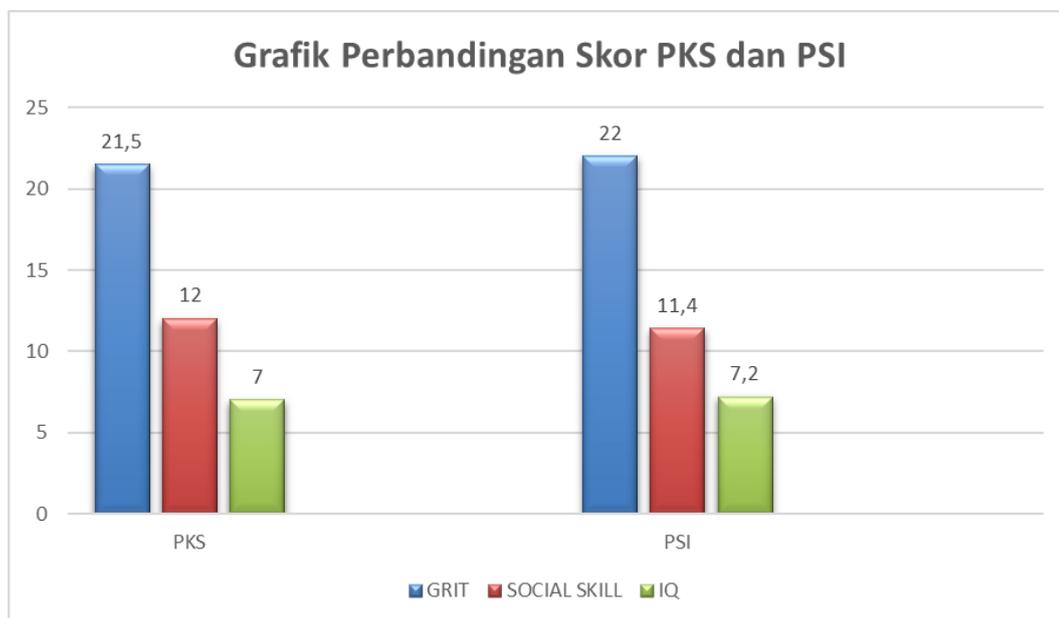
analisis data primer dari pendekatan ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Pertama, hasil dari pengalaman wawancara menggunakan analisis I+E=M, dengan indikator utama Education, didapatkan persepsi yang berbeda dari kedua parpol, PKS berpersepsi masih belum menganggap amat pentingnya persyaratan bagi para calon anggota maupun bakal calon wakil rakyat wajib memiliki gelar akademik S1 dari Universitas (minimal Diploma), sedangkan PSI relatif lebih baik dalam menguatkan sistem merit, karena keinginan kuat parpol keharusan bagi para bakal calon wakil rakyat untuk memiliki gelar akademik minimal sarjana, sedangkan bagi calon anggota belum begitu penting. Kedua, hasil dari wawancara menggunakan analisis Virtue>SocialSkill>Intellectual, analisis ini mengedepankan pada variabel utama Virtue ketimbang dua variabel lainnya, dengan indikator utama Anti-Korupsi, jika indikator utama tidak terpenuhi, maka dapat dinyatakan dengan tegas bahwa parpol tersebut secara otomatis akan dikatakan tidak berbasis sistem merit tanpa menguji variabel lainnya, hasil dari wawancara mengenai persepsi urgensi dari Anti-Korupsi, bagi PKS masih permissif dengan calon anggota atau bakal calon wakil raktat, karena PKS beranggapan korupsi tak semata-mata adalah hal buruk, terlebih jika kasus korupsi itu merupakan jebakan politik rival, karena itu, bagi PKS tidak mungkin untuk mencabut hak sipol bagi seseorang untuk mencalonkan diri meskipun eks napi tipikor, karena hak tersebut dianggap fundamental, ditambah eks napi tipikor sebagai manusia yang tak lepas dari kesalahan dianggap telah bertobat dengan cara menebusnya berupa hukuman penjara, sebaliknya PSI beranggapan, bahwa korupsi adalah sesuatu yang inheren salah dan tidak bermoral, bagi PSI perlu menegakkan disiplin garis partai ini secara tegas, berangkat dari ketidakpercayaan PSI sebagai partai baru yang justru hadir karena kegelisahan terhadap modus dari partai-partai lama yang amat lamban dalam merespon pemberantasan korupsi, jika tak dimulai dari pembenahan internal parpol itu sendiri, maka hasil dari pengukuran tersebut mengatakan bahwa PSI jauh lebih baik daripada PKS dalam cita-cita penerapan sistem merit. Dan yang terakhir, ketiga, dengan menggunakan analisis GRIT, penggunaan analisis ini dengan melakukan wawancara

berdasarkan indikator utama yakni Kegigihan (perseverance), mirip dengan Effort, konsep ini berangkat bahwa kesuksesan seseorang ditentukan dari kerja kerasnya, daya tahan dan konsistensinya terhadap sesuatu, bukan melainkan dari bakat atau talenta belaka, hasil dari pengukuran ini, menunjukkan PKS percaya bahwa kegigihan seseorang terlepas dari latar belakang akademiknya dapat menuai kesuksesan, PKS menganggap bahwa sudah seharusnya menjadi tugas partai untuk membentuk kader yang berkualitas melalui sekolah partai, pun sejalan dengan PSI yang menekankan pentingnya sekolah partai dalam mendidik para kadernya untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam pengisian jabatan-jabatan publik.

Tabel. 3.2. Perbandingan Sistem Merit “Subjective Approaches – Perceived Meritocracy” Rekrutmen Partai Politik

No	Atribute: Independet Variabel	Main Indicator	PKS	PSI	PKC/CC P
1	Virtue	No Corruption	Neither agree and disagree	Totally agree	-
2	Social Skill	Expertise	Disagree	Disagree	-
3	Intellectual	Education	Agree	Agree	-
Analisis: IQ + Effort = Merit		Summary	High	High	-
Analisis: Virtue>SocialSkill>Intellectual		Summary	Low	High	-
Analisis: GRIT = Merit		Summary	High	High	-

Grafik 3.3. Perbandingan Hasil Pengukuran PKS dan PSI



Jika dilihat, berdasarkan hasil dari analisis wawancara secara langsung yang telah dituangkan di grafik 3.3 tersebut di atas, kedua parpol relatif memiliki keinginan yang sama kuat untuk membangun sistem merit, namun selain menggunakan pendekatan dari kedua tabel tersebut, terdapat tambahan/suplemen variabel lainnya sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3.3, yang dipikir dapat merefleksikan keseriusan parpol terhadap pembenahan organisasi parpol berbasis sistem merit, suplemen itu berupa ideologi informil, berbeda dengan ideologi formil yang relatif seragam di dalam UU Parpol yakni Pancasila serta Islam bagi parpol-parpol islam, ideologi bagi visi misi parpol belum nampak terlihat dalam pengelolaan parpol sehari-hari, sehingga suplemen berupa ideologi informil³ sangat dibutuhkan, karena karakternya yang jauh lebih konkrit dan dinamis dengan praktik kehidupan sehari-hari demi merespon kebutuhan dari aspirasi konstituen serta masyarakat, cara mendapatkan suplemen ini dapat dilakukan melalui penelusuran rekam jejak digital baik elektronik maupun cetak, berupa penelusuran program keseharian kerja-kerja partai meliputi pidato resmi, retorika dan gesture politik ketua umum partai dan pengurus di forum resmi parpol berupa munas dan lain-lain, sehingga

³ Jinghan Zeng, *The Chinese Communist Party's Capacity to Rule: Ideology, Legitimacy and Party Cohesion*, (UK: Palgrave Macmillan, 2016), hal. 122.

dari upaya menganalisis bahan hukum sekunder maupun tersier ini, didapatkan informasi mengenai pola hubungan sistem merit di parpol, yakni melalui variabel Ideologi Informil terhadap sistem merit. Bagi PKS sendiri, suplemen yang mengemuka yakni “Bersama Melayani Rakyat⁴”, melalui penguatan kepemimpinan nasional bagi kader dan pejabat publik PKS yang meliputi tiga kriteria, yakni Akseptabilitas, Kapasitas dan Kredibilitas. Akseptabilitas berarti kepemimpinan harus bisa diterima oleh seluruh rakyat Indonesia melalui wujud kepedulian yang tinggi atau empati kepada sesama manusia, kemudian, kriteria kapasitas berarti harus memiliki kemampuan mumpuni atau intelektualitas dalam kepemimpinan, dan ketiga, kriteria kredibilitas dipandang penting bagi pemimpin untuk memiliki perilaku yang baik sesuai dengan aturan hukum dan moralitas. Jika kita menganalisis daripada ideologi informil dari PKS tersebut, nampak bahwa PKS saat ini dan beberapa tahun ke depan, memiliki agenda besar yakni berupa memaksimalkan peran negara aktif dalam kehidupan masyarakat, biasanya konsep ini jika dibandingkan dengan Barat dikenal dengan istilah *Welfare State*, atau *Social Welfare* atau *Capitalism Welfare State*, jika maksudnya seperti itu demikian, maka PKS harus siap menentukan mode negara welfare state yang dianggap cocok dengan Indonesia, jika di dunia hanya mengenal 3 model yakni Skandinavian, Anglo Saxon dan Eropa Kontinental, namun PKS tentu tidak akan memilih salah satu atau barangkali memediasi atau mengkombinasikan dari ketiganya, karena harus bernafaskan nilai-nilai Islam surat Al Haj ayat 77 yang tidak memisahkan kesejahteraan dengan ketuhanan. Semakin nampak terlihat jika PKS tidak memilih ketiga mode tersebut dengan mengambil sikap penolakan secara tegas atas UU Cipta Kerja (selanjutnya disebut Omnibus Law) yang dianggap PKS sangat pro dengan pengusaha, barangkali sudah tepat penolakan ini, karena konsep welfare state yang ditawarkan di dalam omnibus law adalah konsep *Flexicurity* dari *Skandinavian Welfare State Model*. Pilihan welfare state bagi PKS dalam kebijakan sosial (*social policy*) yakni penguatan kepemimpinan dengan membangun keseimbangan antara work dan family, tentu kebijakan ini

⁴ Pidato Politik Presiden PKS Munas V PKS tanggal 30 November 2020, diakses tanggal 6 Oktober 2021.

sudah menjadi hal biasa di negara manapun, ketika merekonstruksi kebijakan-kebijakan welfare state yang harus dimulai dari *family*, namun, PKS masih dianggap belum melakukan reformasi kebijakan-kebijakan welfare state nya ke depan, karena basis family bagi PKS masih bersandar pada kepemimpinan laki-laki di dalam keluarga, padahal dekonstruksi terhadap penyelesaian akar masalah daripada kebijakan ini yakni dekonstruksi terhadap kebijakan-kebijakan sosial bagi keluarga yang khusus menekankan pada women and children, singkatnya berinvestasi pada kesetaraan gender, sebaliknya PKS masih melanggengkan patriarki welfare state. Lantas apa hubungan dari isu penting di dalam isi pidato politik PKS sebagai agenda ideologi informil tersebut dengan penguatan sistem meritokrasi? Jika dianalisis menggunakan formula berjenjang meritokrasi Virtue > Social Skill > Intellectual, ala Bell, justru PKS menyusun aspek kepemimpinan secara bertingkat dengan formula meritokrasi Akseptabilitas > Kapabilitas > Kredibilitas, jika Akseptabilitas=Social Skill, Kapabilitas=Intellectual, Kredibilitas=Virtue, hal ini justru menarik jika diperhatikan kedua formula tersebut yang disusun bertingkat secara berbeda. Bagi PKS, yang terutama adalah Social Skill, kemudian Intellectual, dan terakhir Virtue, konsep ini justru berkebalikan dengan PKC/CCP yang memilih formula Bell, bahwasanya Virtue diatas segala-galanya. PKC sangat mengutamakan aspek Virtue yang berbasis kepada nilai konfusianisme dalam organisasi parpolnya sehari-hari, bagi PKC, tak ada artinya jika seorang kader berpengetahuan tinggi dan berpengalaman namun miskin moralitas. PKC juga tak main-main membenahi parpolnya jika melihat grafik peningkatan signifikan SDM lulusan universitas bagi para kader yang menempati posisi jabatan publik sebut saja perdana menteri Li Keqiang dan Presiden Xi Jinping merupakan lulusan dua universitas terbaik di China yakni Peking dan Tsinghua⁵, sejalan, dengan pernyataan Kishore Mahbubani⁶, yang mengatakan jika tim negosiator China duduk bersama dengan US hari ini, maka

⁵ Andrew, G. Walder, *The Party Elite and China's Trajectory of Change*, hal. 17, dalam Kjeld Erik Brodsgaard dan Zheng Yongnian, *The Chinese Communist Party in Reform*, (New York, Routledge, 2006)

⁶ Kishore Mahbubani, *The Chinese Challenge to American Primacy: Has China Won?*, (New York: Hachete Book Group, 2021), hal. 115.

tim negositor yang terbaik pasti dari China, sedangkan aspek ekspertise sendiri bagi PKC amat sangat diperlukan dengan melihat kinerja/prestasi seorang calon pemimpin sebagai dasar untuk promosi ke tingkatan kepemimpinan yang lebih tinggi. dari analisis ini, maksudnya PKS ingin membangun sistem merit dengan versinya sendiri yang tidak menggunakan formula siapapun yang telah dikenal luas dan teruji baik versi Bell maupun Young. Jika benar demikian, ada potensi kekhawatiran sejalan dengan analisis di awal-awal sebelumnya, kalau PKS permisif dengan semangat pemberantasan anti korupsi sebagai indikator utama aspek Kredibilitas, berkebalikan dengan PKC/CCP dan PSI. sedangkan PSI, melalui penelusuran web resminya, sosial media dan lainnya, ada beberapa retorika yang layak untuk diangkat sebagai pesan cerminan/program dari garis perjuangan ideologi partai yakni terkait retorika milenial, anti-korupsi, anti-intoleransi, dan yang terbaru yakni kuliah gratis, membaca retorika ideologi informil ini, jelas dapat menangkap isi pesan secara tersirat maupun tersurat atas retorika khususnya mengenai anti-korupsi, jika berkaca pada sistem merit dengan menggunakan formula $Virtue > Sosial Skill > Intellectual$, jelas dan tegas bahwa PSI konsisten mengedepankan kepada sistem merit ala Daniel A. Bell, tentu aspek virtue/kebajikan/moralitas bagi PSI adalah yang paling utama ketimbang kedua aspek lainnya, sehingga tak diragukan lagi bahwa PSI amat sangat serius dalam membangun sistem merit di parpolnya. Demikian pula, jika menggunakan formula keutamaan $IQ + Effort = Merit$ dari Michael Young, indikator utama yakni *Education*, jelas PSI amat sangat menginginkan di masa depan calon-calon pemimpin bangsa ini sudah minimal berpendidikan lulusan sarjana, sebagaimana nampak dari retorika kuliah gratis. Dari analisis tersebut, jelas nampak bahwa PSI konsisten menerapkan sistem merit dari formula Young dan Bell.

Tabel. 3.4. Perbandingan Relasi Sistem Merit dengan Ideologi Informil

No	Variabel	PKS	PSI	PKC/CCP
1	Ideologi Formil	Islam	Pancasila 1 Juni	Marxism, Leninism, Mao Thought
2	Ideologi Informil	Servant Leadership/Serve The People/Bersama Melayani Rakyat	Millenial, Anak Muda, Anti Korupsi, Anti Intoleransi, Kuliah Gratis,	Confucianism, Deng Theory, Jiang Zemin Three Represents, Scientific Outlook of Development, Xi

				Theory
3	Sistem Merit	3 Aspek Kepemimpinan Melayani Rakyat: 1. Akseptabilitas (Social Skill) 2. Kapabilitas (Intellectual) 3. Kredibilitas (Virtue)	Bukan Partai Oligarki: Anti Korupsi	Political Meritocracy: 1. Virtue: Anti Korupsi 2. Social Skill: Expertise 3. Intellectual: Education
4	Relasi Sistem Merit (Daniel A. Bell)	Indikator paling utama Virtue ditempatkan di urutan terakhir ketimbang 2 indikator utama lainnya, yang berarti parpol belum berbasis sistem merit	Indikator paling utama Anti Korupsi, berarti parpol yang cukup serius berbasis sistem merit, ditambah ada usaha ke depan mendorong indikator utama lainnya yakni pendidikan (kuliah gratis)	Tentunya berbasis sistem merit, penempatan indikator utama Virtue berbasis ajaran konfusian, penegakan disiplin parpol yang tinggi untuk mencegah konflik antar elit dan <i>helicopter promotion</i> , kelemahannya masih bersifat elitis, karena peluang hanya diberikan bagi kader parpol serta penerapan sistem rekomendasi, belum memberikan akses yang luas bagi masyarakat non-kader
5	Relasi Sistem Merit (Michael Young)	Indikator utama Intellectual di tempatkan di urutan ke-2, yang berarti belum berbasis sistem merit	Meskipun tidak dapat dikatakan parpol berbasis sistem merit, namun ada usaha serius akan masa depan cerah pemerintahan meritokrasi “good governance” melalui advokasi pendidikan kuliah gratis	Peningkatan jumlah signifikan setiap tahun bagi kader yang mengisi jabatan-jabatan di <i>top level management</i> , minimal PhD dari Top Rank University, semisal: Peking Univ, Tsinghua Univ, Harvard Univ, etc.
6	Relasi Ideologi (Ernesto Laclau)	Populism: Procedure+Substantive	Inclusive Populism: Procedure+Substantive	Transnasional-Cosmopolitanism-Substantive Populism
7	Relasi Ideologi (Slavoc Zizek)	Violence	Violence	Violence

KESIMPULAN DAN SARAN

Parpol PKS dan PSI dapat menjadi role model bagi seluruh parpol di Indonesia mengenai manajemen parpol yang berbasis sistem merit, model sistem merit menjadi penting bagi parpol modern di masa depan, karena mobilitas sosial di dalam parpol yang profesional ditentukan berdasarkan pada atribut yang dimiliki oleh setiap orang, yakni virtue, ketrampilan sosial dan kecerdasan, bukan pada keuntungan-keuntungan alamiah seperti kekayaan dan keturunan, demi melahirkan kader-kader berkualitas untuk pengisian jabatan-jabatan publik.

Sementara itu, bagi para pembentuk maupun pelaksana UU Parpol, perlu melakukan revisi UU Parpol yang berbasis kepada sistem merit, pun diikuti bersamaan oleh seluruh parpol untuk melakukan pembenahan pada Anggaran Dasar dan Rumah Tangga yang seharusnya berbasis kepada sistem merit.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Bell, Daniel A., 2020, *Just Hierarchy: Why Social Hierarchies Matter In China and The Rest of The World*, Princeton University Press, New Jersey.

Mahubani, Kishore, 2021, *The Chinese Challenge to American Primacy: Has China Won?*, Hachete Book Group, New York.

Walder, Andrew G., *The Party Elite and China's Trajectory of Change*, dalam Kjeld Erik Brodsgaard dan Zheng Yongnian, 2006, *The Chinese Communist Party in Reform*, Routledge, New York.

Young, Michael, 1961, *The Rise of Meritocracy 1870-2033: An Essay on Education and Equality*, Penguin Books, Great Britain.

Zeng, Jinghan, 2016, *The Chinese Communist Party's Capacity to Rule: Ideology, Legitimacy and Party Cohesion*, Palgrave Macmillan, UK.

Internet:

Partai Keadilan Sejahtera, "Pidato Politik Presiden PKS Munas V PKS", <https://pks.id/video/pidato-politik-presiden-pks-ahmad-syaikhu-di-acara-puncak-munas-v-pks>, diakses tanggal 6 Oktober 2021.